

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN PASAR DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Srata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau*

OLEH:

DEFRI HANDRIAN
NIM : 11375100606



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S.1**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN PASAR DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Srata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau*

OLEH:

DEFRI HANDRIAN
NIM : 11375100606



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Defri Handrian

Nim : 11375100606

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Skripsi : Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Mewujudkan Kebersihan Dan Ketertiban Pasar Di Kota Pekanbaru.

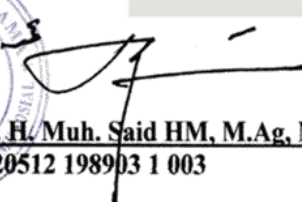
Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing


Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIK: 130 712 075


Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial




DR. DRS. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP: 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan,
Administrasi Negara


DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP: 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN PASAR DI KOTA PEKANBARU

Oleh

Defri Handrian

11375100606

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi dari persoalan ketertiban dan kebersihan pasar. Dalam pelaksanaan ketertiban dan kebersihan pasar tersebut di landaskan pada Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan dan perindustrian. Dalam peraturan walikota tersebut dijelaskan yang menjadi tugas-tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif. Objek penelitian ini adalah pasar Cikpuan dan Pasar Agus salim. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam tugas pokok dan fungsinya tersebut bidang pasar sudah melakukan peranannya, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Adapun faktor penyebab belum terwujudnya ketertiban dan kebersihan pasar adalah Faktor internal meliputi Program kerja yang tidak terstruktur, pelaksanaan yang belum maksimal dan konsisten dan juga keterbatasan anggaran sehingga penyediaan sarana ketertiban dan kebersihan yang belum terpenuhi, pengawasan yang masih belum maksimal, dan juga belum adanya tindakan yang tegas kepada yang melanggar aturan dan kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan kebersihan dan ketertiban pasar yaitu kesadaran masyarakat baik itu pedagang dan pengunjung yang kurang tentang nilai ketertiban dan kebersihan.

Kata Kunci: Peran, Kebersihan, Ketertiban dan Pasar.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT , karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Mewujudkan Kebersihan dan Ketertiban Pasar di Kota Pekanbaru”** ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan. Sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari mengumpulkan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil.

Oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada yang terhormat:

Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Dasrizal dan ibunda Indrawati, yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, tanpa rasa mengeluh, selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik materil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun moril, pengorbanan tiada batas yang hingga kapanpun takkan bisa penulis balaskan.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.AG, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak DR. DRS. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta seluruh Stafnya.

Bapak DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Jurusan dan Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.Kp selaku sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos M.Si, selaku pembimbing sekaligus Mentor dalam berbagai Hal bagi penulis, yang telah membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah banyak menyumbangkan ilmunya selama penulis mengenyam bangku pendidikan di perkuliahan.

Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersumbangsih dalam kelancaran penulis melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam skripsi.

Seluruh Pejabat, Pegawai dan Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis.

Seluruh keluarga, sahabat, rekan-rekan seangkatan, senior, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga selesainya studi penulis.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernilai ibadah disisiNya. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbrau, 02 Oktober 2019
Penulis,

Defri Handrian

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Pemerintah.....	11
2.2. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah.....	12
2.3. Peran Pemerintah Daerah.....	20
2.4. Organisasi Perangkat Daerah.....	24
2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pasar Pada Kebersihan dan Ketertiban.....	27
2.6. Konsep Pasar.....	29
2.7. Konsep Kebersihan dan Ketertiban	33
2.8. Penelitian Terdahulu	35
2.9. Konsep Islam Tentang Kebersihan dan Ketertiban	36
2.10. Definisi Konsep.....	37
2.11. Konsep Operasional	38
2.12. Kerangka Pemikiran.....	39
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
3.2. Jenis Dan Sumber Data.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4. Informan Penelitian.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Keadaan Geografis.....	45
4.2. Keadaan Penduduk	47
4.3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Data Pasar Objek Penelitian	57
5.2. Peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru.....	58
5.3. Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Kebersihan dan Ketertiban Pasar	90
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	93
6.2. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru	3
Tabel 2.1 Konsep Operasional	38
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	43
Tabel 4.1 Luas Kecamatan Kota Pekanbaru	46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru.	47
Tabel 5.1 Potensi Pasar Objek Penelitian	57
Tabel 5.2 Program Kebersihan dan Ketertiban Bidang Pasar	60
Tabel 5.3 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kebersihan (Pasar Cikpuan).....	80
Tabel 5.4 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kebersihan (Pasar Agus Salim).....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 5.1 Kondisi Pasar Cik Puan.....	68
Gambar 5.2 Kondisi Pasar Agus Salim.....	69
Gambar 5.3 Kondisi Kebersihan Pasar Agus Salim	81
Gambar 5.4 Kondisi Kebersihan Pasar Agus Salim	83
Gambar 5.5 Kondisi Kebersihan Pasar Cik Puan	84
Gambar 5.6 PKL Pasar Agus Salim.....	89
Gambar 5.7 PKL Pasar Cik Puan.....	89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Foto Dokumentasi
- Lampiran 2. SOP Kebersihan dan Ketertiban
- Lampiran 3. PERWAKO Nomor 114 Tahun 2016
- Lampiran 4. Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 6. Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dinas Perindustriandan perdagangan Kota Pekanbaru
- Lampiran 7. Riwayat Hidup Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya adalah sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kota menjadi lebih baik, agar terciptanya pembangunan yang baik maka pemerintah dan masyarakat perlu melakukan yang namanya kerja sama agar terciptanya masyarakat moderen sehingga tercapainya UUD 1945 tentang pembangunan nasional. Pembangunan yang menyeluruh dan sistematis sudah dilakukan dan menunjukan hasil yang dapat mensejahterakan rakyat. Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu rangkaian yang telah dilakukan secara sadar, terencana dan berkesinambungan dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik, pembangunan nasional akan terwujud bila adanya kesinambungan program antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah/kota.

Tingkat persaingan dunia usaha diindonesia sangatlah ketat, karena setiap pengusaha senagtiasa berusaha untuk mendapatkan pangsa pasar dan meraih konsumen baru. Pengusaha harus dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat agar usahanya tetap berjalan dan memenangi persaingan maka makin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan harapannya. Sehingga kosuekuensi dari perubahan tersebut adalah konsumen jadi lebih cermat dan pintar menghadapi setiap produk yang diluncurkan.

Pekanbaru merupakan kota yang saat ini sedang berkembang menuju kota yang lebih baik, seiring dengan itu diperlukan adanya penataan kota dimana salah satunya adanya pengelolaan kebersihan dan ketertiban. Pembangunan suatu kota



akan terwujud dan dirasakan oleh segenap masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah dan cermin sebagai adanya kebersihan. Keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan. Kalau dilihat dari secara fisik pembangunan kota telah dilaksanakan tetapi belum melihatkan kebersihan, ketertiban dan keindahan. Oleh karena itu, maka upaya pembangunan tidak akan bermakna tanpa adanya kebersihan dan ketertiban. Dengan demikian hal ini harus diperhatikan karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan kebersihan pangkal sehat.

Pasar adalah tempat interaksi penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Semua masyarakat pasti membutuhkan pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Keberadaan pasar tradisional memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah secara umum khususnya masyarakat sekitar pasar. Lebih dari itu, pasar tradisional juga merupakan sarana interaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan-hubungan sosial. Sebuah pola interaksi yang tidak akan ditemui di pusat perbelanjaan modern yang berjiwa individualistik. Dan yang tak kalah penting adalah dalam interaksi tersebut juga akan tersemayamkan nilai-nilai kebersamaan. Pasar tradisional juga menampung para pedagang, tenaga kerja, dan tempat berputaran uang, barang dan jasa bagi masyarakat lokal, maka dari itu apabila pasar dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk sarana pasar yang disediakan oleh pemerintah kota dikelola langsung oleh pemerintah kota Pekanbaru yang memberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang dinas pasar sebagai pneraturan pasar yang akan melakukan penertiban tersebut yang diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengguna pasar.

Adapun Tupoksi yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan pada bidang pasar kota pekanbaru, yaitu :

- a. Pengembangan pasar dan pengawasan
- b. Kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL
- c. Seksi Retribusi

Dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kota menyediakan pasar untuk masyarakat yang dikelola pemerintah. Dikarenakan perkembangan kota pekanbaru semakin lama semakin pesat. Adapun pasar yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu pada tabel dibawah.

Tabel 1.1
Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Cik Puan	Jalan Tuanku Tambusai, kecamatan Sukajadi
2	Pasar Rumbai	Jalan Sekolah, Kecamatan Rumbai Persisir
3	Pasar Labuh Baru	Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki
4	Pasar Simpang Baru	Jalan HR. Soebrantas, Kecamatan Tampan
5	Pasar H. Agussalim	Kecamatan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota
6	Pasar Lima Puluh	Jalan Sultan Sayrif Kasim, Kecamatan Lima Puluh

Sumber: Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru

Dalam peraturan daerah No 4 Tahun 2000 membahas tentang segi kebersihan dan langkah-langkah penerapan yang diambil oleh pemerintah daerah, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyediakan tong sampah baik ditempat umum maupun ditempat yang banyak dilalui oleh masyarakat.
2. Menunjuk petugas kebersihan untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat.
3. Menyediakan tempat atau lapangan untuk memusnahkan sampah.
4. Membuat larangan tentang membuang sampah sembarangan.
5. Menetapkan retribusi atau biaya kebersihan kepada masyarakat.
6. Memberikan atau membebaskan keringanan biaya kebersihan apabila masyarakat tersebut mendapat izin atau persetujuan dari Walikota atau adanya alasan-alasan tertentu yang masuk akal.
7. Menyiapkan pengawasan kepada petugas kebersihan.
8. memberikan sanksi administrasi/ketentuan pidana.

Dalam rangka untuk menjaga kebersihan untuk masyarakat maka adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang dibentuk dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2000 tentang retribusi pasar dan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2000 tentang retribusi kebersihan dalam pasal 9 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan tanah atau lapangan atau yang merupakan sumber sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 dan 3 peraturan daerah ini, atas imbalan jasa penyelenggaraan, pelayanan, pengangkutan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dari TPS ke TPA sebagaimana yang dimaksud pasal 6 dan 7 dikenakan retribusi kebersihan. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semata- mata hanya untuk

masyarakat, agar kota ini terlihat bersih dan tertib sehingga membuat nyaman masyarakat.

Dalam peraturan waikota kota pekanbaru, nomor 114 tahun 2016 dinas perindustrian dan perdagangan mengintruksikan kepada Bidang pasar untuk melaksanakan beberapa hal tentang Kebersihan dan Ketertiban, yaitu :

Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.

Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL.

Seksi Retribusi.

Salah satu untur pelaksana program yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian khususnya pada bidang pasar kota pekanbaru yaitu kususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar, yang dikeluarkan sesuai intruksi oleh pemerintah, maka dari itu UPTD menerapkan suatu kebijakan untuk pedagang dalam hal Kebersihan dan Ketertiban, Yaitu:

1. Segi Kebersihan

- a. Disediakkannya petugas kebersihan untuk membersihkan pasar.
- b. Terdapat tong sampah guna untuk membuang sampah.

Segi Ketertiban

- a. Telah disediakan tempat kusus parkir kendraan roda dua dan kendraan roda 4 agar tidak menggunakan badan jalan guna untuk parkir kendraan.
- b. Telah disediakan kios/tempat dagang didalam kawasan pasar.

Pelaksanaan Kebersihan dan ketertiban harus sesuai dengan yang di atur oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru. Namun hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan-

kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti masih banyaknya sampah berserakan padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah, badan jalan masih dipergunakan sebagai tempat berjualan oleh PKL dan tempat parkir. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 Tentang pedagang kaki lima (PKL) dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 bahwa pedagang kaki lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.

Untuk menciptakan Pekanbaru sebagai Kota yang bersih maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum yang meliputi: tertib jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, jalur air, kolam, tertib keamanan lingkungan dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai ketentuan dan pidana serta adanya pengawasan dan penyusutan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di pasar Agus Salim dan Cik Puan dari segi pelaksanaan , yaitu:

- a. Tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir, namun ruas jalan dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4 sehingga mengganggu pengendara lain untuk melintas (parkir tidak tertib).
- b. Sudah adanya Peneguran dari pihak UPTD agar tidak berjualan di badan jalan, namun masih ada juga pedagang yang melakukan berjualan di badan jalan.
- c. Sudah disediakan tanaman hias, namun tidak dirawat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jalan pasar masih ada yang hancur dan berlubang sehingga mengganggu pengendara untuk melintas.
- e. Telah tersedianya tong sampah, namun masih membuang sampah sembarangan.
- f. Sudah adanya teguran dari pihak UPTD kepada para pedagang tentang sampah di tempat mereka berjualan. Tetapi pedagang masih juga tidak menjaga kebersihan ditempat mereka berjualan.

Masalah yang ada di pasar simpang baru kecamatan tampan dari segi

Kebersihan dan Ketertiban, yaitu:

- a. Parkir kendaraan tidak pada tempatnya.
- b. Badan jalan masih dipergunakan untuk berjualan,
- c. Masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar pasar.
- d. Selokan yang dangkal dan sempit.
- e. Jalanan dipasar masih ada yang rusak atau berlubang.
- f. Kios atau tempat pedagang berjualan masih ada yang belum tertata dengan rapi terlihat berantakan dan beracakan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai

Kebersihan dan Ketertiban Pasar dan mengambil judul, yaitu: “**Peran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Kebersihan Pasar Di Kota Pekanbaru**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang permasalahan yang ada, maka perumusan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru?

Apa saja Faktor Penghambat Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru?

13. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimanakah peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui apa saja Faktor Penghambat Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mewujudkan ketertiban dan kebersihan pasar di Kota Pekanbaru.

14. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa permasalahan tentang Kebersihan dan Ketertiban.

Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait.

Sebagai bahan referensi bagi peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya lima bab, dari masing-masing bab dibagi dalam 5 sub bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan di bahas mengenai teori yang di jadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini, serta indikator yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan di bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang kondisi Kota Pekanbaru dan Tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru baik mengenai Sejarah Berdirinya maupun Tugas Dinas Sosial dan setiap Bagian yang ada dalam Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan hasil pengelolaan data lapangan, hasil penelitian dilapangan serta wawancara tentang pembinaan anak jalanan di kota Pekanbaru

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh analisa yang telah dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemerintah

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah” :

1. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah;

“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan lain kata “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”. Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu.

Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang

dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara (Bayu Surianingrat, 9-10: 1992).

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan (Bayu Surianingrat, 11: 1992)

Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Pemerintahan desa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.2. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan daerah dijalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara efektif, guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda (zelfwetgeving) dan penyelenggaraan pemerintahan (zelfbestuur) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (central government), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government). Pengaturan pelaksanaan kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan negara dipancarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang disebabkan faktor-faktor tertentu (Agus Salim, 27: 2007).

Kekuasaan pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya kewenangan pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk mengurangi kekuasaan pemerintah pusat (Agus Salim, 27: 2004). Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Hubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat dengan daerah di mana suatu negara kesatuan yang gedecentraliseerd, pemerintahan pusat membentuk daerah-daerah, serta menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah.

a. Penerapan Asas Desentralisasi

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji dan melihat harapan asas ini dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Perdebatan yang muncul diakibatkan oleh cara pandang dalam mengartikulasikan sisi mana desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa hal, di antaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan; serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Pertama, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan. Dalam arti ketatanegaraan, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Pemaknaan desentralisasi dibedakan dalam empat hal; (1) kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi/pemerintah kepada yang lain; (2) pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih luas daripada pejabat yang disertai kewenangan tersebut; (3) pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah disertai kewenangan itu, mengenai pengambilan keputusan atau isi keputusan itu; serta (4) pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tak dapat menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil, tidak dapat secara bebas menurut pilihan sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah disertai kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat menyingkirkan pejabat yang telah disertai kewenangan itu dari tempatnya.

Kedua, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan bahwa desentralisasi adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Desentralisasi di bidang pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah (Arif Nasution, 16: 2000).

Desentralisasi politik merupakan pelimpahan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, mendorong masyarakat dan perwakilan mereka untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat bawah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara independen, dan intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah tidak sebagai sesuatu yang harus ditakuti oleh pemerintah pusat karena pemberian kewenangan tersebut tidak akan terlepas dari koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah hanya sebagai salah satu usaha untuk lebih melancarkan tugas tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pembangunan, dan pelayanan masyarakat di setiap daerah.

Ketiga, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi sistem pemerintahan merupakan pembagian, penyebaran, pemencaran, pemberian kekuasaan dan kewenangan. Tresna berpandangan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan mengatur diri kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi, di dalam pemerintahan negara. Sedangkan Soehino berpandangan bahwa, desentralisasi kedaerahan memberi ruang kepada alat perlengkapan suatu lembaga hukum untuk membentuk hukum in-abstract dan pemberian delegasi kepada alat perlengkapan lembaga hukum publik untuk membentuk aturan hukum in-concreto.

Keempat, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu ya diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri. Jadi, desentralisasi menyangkut pembentukan daerah otonom dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Arif Nasution, 16: 2000). Pemaknaan desentralisasi yang dikaitkan dengan demokratisasi sendi-sendi pemerintahan, bahwa otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat sendiri. Desentralisasi dalam paham demokrasi diharapkan dapat mewujudkan daerah-daerah otonom yang memiliki kewenangan menentukan nasib sendiri, yaitu membuat peraturan dan menjalankannya serta menjalankan peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi.

Dari beberapa pandangan pakar di atas, dengan jelas menafsirkan bahwa dimensi makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah pemerintahan dalam bingkai daerah otonom (Hoessein, Benyamin, 31: 2005).

Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi bersifat hak dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas urusan yang telah diserahkan kepada badan-badan otonom itu. Jadi, pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah, sementara pendelegasian dalam dekonsentrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung antara petugas perorangan pusat di pusat kepada petugas perorangan pusat di daerah.

b. Penerapan Asas Dekonsentrasi

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula. Pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di pemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat di pemerintahan daerah (Agus Salim, 27: 2004).

Konsep pelaksanaan desentralisasi bisa bersifat administratif dan politik. Sifat administratif disebut dekonsentrasi yang merupakan delegasi wewenang pelaksanaan kepada tingkat-tingkat lokal dan sifat politik merupakan devolusi, yang berarti bahwa wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya diberikan kepada pejabat-pejabat regional dan lokal. Pada hakikatnya, alat-alat pemerintah pusat ini melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah. Penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada alatnya di daerah karena meningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi; dekonsentrasi, desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi yang akan diambil/dibuat itu; pejabat yang menyerahkan kewenangan itu (betul)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengganti keputusan yang pernah diambil/dibuat oleh pejabat yang disertai kewenangan itu dengan keputusan sendiri, dan pejabat yang menyerahkan kewenangan itu (betul) dapat mengganti pejabat yang disertai kewenangan dengan yang lain menurut pilihan sendiri dengan bebas (Agus Salim, 32: 2004).

Dalam kajian hukum tata negara, pemerintah yang berdasarkan asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

c. Penerapan Asas Tugas Pembantuan (Medebewind)

Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat “membantu” dan tidak dalam konteks hubungan “atasan-bawahan”, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.

No. 32/2004 menegaskan dalam Bab 1, Pasal 1 butir 9 bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta da pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan dapat dijadikan sebagai terminal menuju “penyerahan penuh” suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Kaitan tugas antara tugas pembantuan dengan desentralisasi dalam melihat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya bertolak dari: (1) tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Jadi, pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan; (2) tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan karena dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi, daerah punya cara-cara sendiri melaksanakan tugas pembantuan; serta (3) tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, yang mengandung unsur penyerahan, bukan penugasan (Agus Salim, 33: 2004). Yang dapat dibedakan secara mendasar bahwa kalau otonomi adalah penyerahan penuh, maka tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

2.3. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Soekanto (2009: 212-213) Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan sesuatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu terikat dengan yang lain dan sebaliknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dibedakan dalam dua pengertian yuridis, yakni: Selaku alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara yang kekuasaannya melekat pada kedudukan seorang kepala negara. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan atau selaku administrator negara (pejabat atau badan atas usaha negara) Pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan, kegiatan, urusan, atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Eksekutif adalah cabang kekuasaan dalam negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri.

Administrasi (negara) adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan, baik di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan administrasi (negara). Berkaitan hubungan antara pemerintahan dan administrasi negara, maka didalam organisasi modern sebagaimana negara dan perangkatnya, Max Weber mengintroduksi terminologi birokrasi dengan mengatakan sebagai berikut: (Dahl, 1994: 13) Pemerintah tidak lain adalah yang berhasil menopang klaim bahwa perintahlah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan berbentuk birokrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran. Sedangkan Birokrasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Birokrasi patrimonial* yang berfungsi berdasarkan nilai-nilai tradisional yang tidak memisahkan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dinas dengan urusan pribadi pejabat. *Birokrasi modern* (rasional) dicirikan dengan adanya spesialisasi, hukum, pemisahan tugas dinas dan urusan pribadi. Lebih jauh berkaitan dengan birokrasi publik di Indonesia, Miftah Thoha (Miftah Thoha, 2000: 4-5) memberikan catatan tentang restrukturisasi dan reposisi birokrasi publik. Sekurangnya terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek penegakan demokrasi, aspek perubahan sistem politik, dan aspek perkembangan teknologi informasi.

Aspek Penegakan Demokrasi: Prinsip demokrasi yang paling urgen adalah meletakkan kekuasaan pada rakyat dan bukan pada penguasa. Oleh karena itu struktur kelembagaan pemerintah yang disebut birokrasi tidak dapat lepas dari kontrol rakyat. Wujud kekuasaan dan peran rakyat ialah bahwa pada setiap penyusunan birokrasi harus berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang, rakyat terlibat dalam mendesain dan menetapkan lembaga-lembaga pemerintahan atau birokrasi di pusat maupun di daerah.

Aspek Perubahan Sistem Politik: Era reformasi saat ini sungguh menghadapi persoalan kondisi mental, sikap dan perilaku politik warisan rezim terdahulu terutama dalam kerangka single majority Golongan Karya. Pada masa orde baru semua posisi jabatan dalam organisasi publik ditempati oleh kader-kader Golkar. Oleh karena itu tidak dapat dibedakan manakah yang “birokrat tulen” dan

manakah “birokrat partisan” Struktur organisasi publik berkembang antara pejabat birokrasi dan pejabat politik. Semua organisasi pemerintah dikaburkan antara jabatan karier dan nonkarier, antara jabatan birokrasi dan jabatan politik.

Aspek Perkembangan Teknologi Informasi: Kemajuan jaman dan perubahan global telah menjadikan cara kerja suatu birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi. Cara demikian telah menciptakan “birokrasi tanpa batas dan tanpa kertas” Berdasarkan kondisi demikian, maka tatanan organisasi akan berubah menjadi lebih pendek dan ramping. Sesuai dengan asas demokrasi, kewenangan birokrasi menjadi tidak hanya berada pada tataran penguasa melainkan tersebar dimana-mana (decentralized). Birokrasi tanpa batas dan tanpa kertas telah menjadikan birokrasi tidak lagi secara tegas mengikuti garis hirarki. Struktur organisasi bersifat ad-hoc, komite, dan matrik akan menjadi model organisasi mendatang, yang sering disebut sebagai organisasi struktur logis (logical structure).

Menurut Max Weber (Dahl, 1994:13), pemerintah tidak lain adalah yang berhasil menopang klaim bahwa perintahlah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan dibentuk birokrasi. Sedangkan tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran.

Pada suatu pemerintahan terdapat fungsi legislasi. Fungsi legislasi secara umum adalah fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan atau pembuatan kebijakan. Mengacu pada pengertian ini, kewenangan legislasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh parlemen (DPR/DPRD), tetapi juga oleh institusi-institusi lain seperti eksekutif serta yudikatif. Akan tetapi kajian modul ini hanya akan berfokus pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

Sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2003 (tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota. Dalam UU nomor 32 tahun 2004 (tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan di daerah atau unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

2.4. Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi. Hal ini disusun dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Berdasarkan susunan, tugas dan fungsi yang satu sama lain berbeda, yang diharapkan adalah terselenggaranya roda pemerintahan yang baik.

Adapun pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah adalah: penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah setelah diberlakukannya prinsip otonomi yang seluas-luasnya.

Meskipun diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, akan tetapi peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan melalui tugas pembantuan. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana tertera pada UU Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Terkait dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi perangkat daerah, secara formal keberadaannya diatur dalam Pasal 208 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat daerah terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Daerah,
3. Lembaga Teknis Daerah
4. Kecamatan dan
5. Kelurahan. (Widjaya, 2001:30).

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

1. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
3. Kemampuan keuangan daerah
4. Ketersediaan sumber daya aparatur
5. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 6, kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:

- a. Umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- b. Teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah; dan
- c. Jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pasar pada Ketertiban dan Kebersihan

1. Seksi Kebersihan, ketertiban dan Pembinaan PKL
 - a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
- e. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.
- f. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- g. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar.
- h. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
- i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- j. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- k. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- l. Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.
- m. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang.
- n. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi.
- o. Perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.
- p. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima.

2.6. Konsep Pasar

Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar (dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran) terbentuk sebagai salah satu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota. Pemaknaan ini merefleksikan fungsi pasar yang lebih luas, namun selama ini kurang tergarap pengelolaannya dalam berbagai kebijakan. Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pasar, seperti kebijakan perdagangan, tata ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari konsep pasar. Pengabaian terhadap fungsi sosial-kultural pasar inilah yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk pasar modern yang bernuansa kapitalistik, yang lebih menonjolkan kenyamanan fisik bangunan, kemewahan, kemudahan, dan kelengkapan fasilitas namun menampilkan sisi lain yang individualistik, “asing”, dan anonim.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistim, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha penjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang meningkatkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari pedagang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi jenis dan berbagai jenis komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan (Gunadarma, 2012).

Menurut Suparlan dalam Ramilus (2005), pasar adalah sekelompok bangunan dan sebagian beratap dan terbuka tanpa tap yang ditunjuk oleh pemerintah dimana pedagang-pedagang berkumpul untuk memperdagangkan dan menjual barang dagangnya. Pasar adalah tempat yang sifatnya tetap, permanen, bertemunya produsen dan konsumen atau pedagang dan pembeli, tempat terjadinya tukar menukar antara barang dan jasa yang telah diproduksi produsen dengan konsumen secara langsung atau difasilitasi oleh distributor (pedagang).

Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang mempengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga (Fattah, 2008).

Jenis-jenis pasar ada 2 yaitu:

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang mudah dibangun oleh pihak pemerintah, koperasi, swasta dan swadaya masyarakat. Tempat usahanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang menyediakan barang-barang konsumen sehari-hari masyarakat. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan koperasi. Proses penjualan dan pembeli dilakukan dengan tawar menawar dan pengelolaannya bermodal kecil.

b. Pasar Modern

Pasar moderen adalah pasar yang digunakan oleh pihak pemerintah, swasta, dan koperasi yang dikelola secara moderen menjual barang kebutuhan sehari-hari barang lainnya bersifat tahan lama. Modal yang dikelola oleh pedagang jumlahnya besar. Kenyamanan berbelanja bagi pembeli sangat diutamakan. Biasanya penjual memasang label harga pada setiap barang. Contoh dari pasar moderen adalah plaza, swalayan (supermarket), dan minimarket.

Menurut Amir dan Jaswita (2006), yang dimaksud dengan pedagang adalah mereka yang memberikan jasa prantara menghubungkan antara produsen dengan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sementara itu, pedagang sendiri jenisnya bermacam-macam. Ada pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kios, pedagang kaki lima, grosir (pedagang besar), pedagang supermarket dan sebagainya. Jenis-jenis pedagang ini lazim dibedakan berdasarkan pada cara penawaran barang dagangannya masing-masing. Pedagang dapat dibedakan atas pedagang besar dan pedagang kecil. Dalam perdagangan besar, barang tidak dijual atau disampaikan langsung kepada konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pengguan, sedangkan dalam perdagangan kecil,jual beli berlangsung secara kecil-kecilan dan barang dijual langsung kepada konsumen.

Upaya pemerintah dalam mengelolah dan membina pasar tradisional pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia salah satunya menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini ikut serta mendorong usaha perpasaran tumbuh dengan pesat. Tumbuhnya usaha perpasaran dengan pesat mewujudkan bahwa semakin tingginya kebutuhan akan tempat usaha bagi masyarakat dan semakin meningkat serta beragamnya keinginan konsumen untuk menentukan tempat berbelanja.

Peran dinas pasar dalam mengelolah pasar daerah yaitu memberikan tata pemberian izin dan pemakaian tempat berjualan, melaksanakan dan mengawasi kebersihan dan ketertiban pasar, dan melaksanakan ketentuan retribusi dan pemeliharaan pasar.sebagaimana yang di atur pada Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016.

Pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar moderen. Pasar tradisional merupakan salah satu infrastruktur ekonomi bagi kabupaten dan ikut serta mendukung kebersihan otonomi daerah tetapi pada kenyataan pasar tradisional seara kualitas maupun kuantitas masih kalah jauh dengan pasar moderen. Kondisi demikian memerlukan peranan dinas pasar dalam mengelolah dan membina pasar tradisional agar terjaga kebersihannya. Bagaimana peranan dinas pasar dalam mengelolah dan membina pasar daerah untuk dapat mewujudkan tujuan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang

agar terasa nyaman dan aman bagi para pengunjung yang akan membeli barang kebutuhan sehari-hari (Gunadarma, 2012).

2.7. Konsep Kebersihan dan Ketertiban

Bersih adalah keadaan kondisi lingkungan dan sarana dan menampilkan kebersihan, kerapian dan sehat disemua tempat yang menjadi tempat kegiatan manusia. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah bau. Kebersihan adalah salah satu dari tanda yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menyebarkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain, Raharjo dalam Jaswita (2006).

Salah satu penghambat kebersihan adalah sampah yaitu bahan buangan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga lagi untuk dimanfaatkan. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan sesuatu yang tidak berguna lagi dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula, Tandjung dalam Hermanto (2007). Pengertian sampah itu sendiri adalah sebagian dari benda atau hal yang dipandang tidak digunakan lagi, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya yaitu:

Sampah organik (degradable): tidak dapat diolah kembali, seperti sayur, makanan daun kering dan sebagainya.

Sampah anorganik (undegradable): dapat diolah kembali atau daur ulang seperti kertas, plastik, botol dan lain sebagainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebersihan lingkungan sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi, sangat diharapkan bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan, agar lingkungan kita bersih dari sampah-sampah, kebersihan adalah cerminan hidup dari seseorang, hal ini harus dibiasakan dan dibudidayakan sampai kapanpun, kalau tidak banyak menimbulkan penyakit bagi manusia itu sendiri, Tanjung dalam Hermanto (2007).

Ketertiban adalah aturan yang mengharuskan segala sesuatu supaya berjalan sejalan agar tidak berantakan dan teratur. Dalam upaya pelaksanaan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan K3 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000 dapat dilihat pengertian kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000, yaitu:

1. Kebersihan adalah suatu lingkungan yang bersih, indah dan tertib dari segala macam yang mengenai masalah sampah di lingkungan.
2. Keindahan adalah kepandaian seseorang menata, merawat dan membersihkan lingkungan secara rapi, indah dan apa bila orang yang melihatnya akan merasa senang bila mereka berada disana.
3. Ketertiban adalah terjaganya keselamatan, kenyamanan masyarakat bisa hidup tenang, tertib tanpa merasa terganggu atau ketakutan terhadap kejadian yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dan relevan dengan kajian penelitian adalah sebagai berikut:

Penelitian dari Rizki Aperta dengan judul Partisipasi Pedagang Dalam Pelaksanaan Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk mekanisme partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru dimulai dari proses tahap perencanaan, tahap implementasi yaitu mengadakan sosialisasi tentang bentuk regulasi pengelolaan sampah. selanjutnya tahap pengawasan dan pengendalian yaitu kegiatan pemeliharaan dan peningkatan disiplin masyarakat, pengelola membuat laporan, untuk disampaikan ke pemerintah maupun masyarakat sesuai aturan atau mekanisme yang disepakati. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yaitu bisa dilihat dari faktor jenis pekerjaan karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Lamanya berdagang memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk peran serta masyarakat dalam proses keterlibatan pedagang dalam kegiatan fisik/kerja bakti. Semakin lama seseorang tinggal, menetap dan berdagang di suatu daerah pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan psikologisnya. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal, semakin tinggi ikatan psikologis dengan lingkungannya yang berpengaruh pada besarnya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian oleh Adi Mandala Louhenapessy dengan judul Implementasi Kebijakan Kepala Pasar Dalam Progam K3 (Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban) Di Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Dengan hasil penelitian Implementasi kebijakan kepala pasar dalam program K3 yaitu pelaksanaan sistem piket K3, pelaksanaan penertiban pedagang, pelaksanaan supervisi kebersihan, pelaksanaan penagihan *service charge*, dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak kelurahan, babinsa dan babinmas.

2.9. Konsep Islam tentang Kebersihan dan Ketertiban

Islam adalah agama yang universal, integral dan menyempurnakan bagi semua sistem yang ada. Dengan kata lain sesungguhnya ALLAH SWT jauh – jauh sebelumnya telah memberikan konsep yang paling sempurna untuk mengatasi berbagai penyimpangan oleh manusia. Adapun ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan Kebersihan dan Ketertiban, yaitu :

..... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Al-Baqarah: 222).

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan (termasuk kebersihan dan kerapian).” (HR. Muslim no. 91)

Dari beberapa dalil diatas dapat disimpulkan bahwa, sebagai seorang muslim kita dituntut untuk selalu menjaga kebersihan. Diri kita sendiri saja dituntut untuk menjaga kebersihan, demikian juga lingkungan yang besar kita

harus selalu menjaga kebersihannya. Tujuannya bukan untuk yang lain, melainkan untuk keadaan manusia itu sendiri.

2.10. Definisi Konsep

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Peran bidang pasar bagian kebersihan, ketertiban dan pembinaan pedagang kaki lima adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi yang tertera pada peraturan walikota nomor 114 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi.

2. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, daerah kota pekanbaru yang tempat usahanya berupa kios, toko, dan los yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar. Pedagang kaki lima khusus yang berada di pasar milik pemerintah kota Pekanbaru yaitu pasar Agus Salim dan pasar Cik Puan.

Kebersihan dan Ketertiban pasar adalah salah satu dari tanda yang baik.

Kebersihan pasar merupakan keadaan pasar yang bebas dari kotoran, dalam artian sampah-sampah, bau dan genangan air di kelola dengan sebagaimana mestinya. Ketertiban pasar adalah segala unsur disediakan dan ditempatkan pada tempatnya, seperti penyediaan parkir dan penyusunan parkir sesuai dengan prosedur yang diterbitkan sehingga tidak mengganggu keadaan dan lingkungan sekitarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11. Konsep Operasional

Untuk mempermudah analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam penelitian maka penulis mengoprasionalkan konsep oprasional. Dalam penelitian konsep oprasional penelitian adalah Peraturan Walikota Kota Pekanbaru nomor 114 Tahun 2016. Yaitu, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel penelitian	Indikator	Sub-indikator
Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Mewujudkan Ketertiban dan Kebersihan Pasar di Kota Pekanbaru	Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja	1. Pembuatan Program kerja; 2. Pelaksanaan Program Kerja
	Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar.	1. Menyediakan pelayanan pelaporan permasalahan di pasar; 2. Melakukan penanganan laporan permasalahan
	Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.	1. Penyediaan petugas ketertiban pasar; 2. Melakukan pembinaan petugas ketertiban; 3. Melaksanakan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
	Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.	1. Membangun kerja sama dan melakukan koordinasi pada pihak keamanan.
	Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar.	1. Melakukan pengawasan kebersihan; 2. Pemeliharaan kawasan pasar; 3. Melakukan penghijauan pasar; 4. Menyediakan pertamanan dalam pasar.
	Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.	1. Penyediaan petugas kebersihan; 2. Menyediakan sarana dan peralatan kebersihan
	Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.	1. Melakukan evaluasi program kerja;
	Penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.	1. Penyediaan tempat usaha dagang.

Sumber: PERWAKO No 114 Tahun 2016

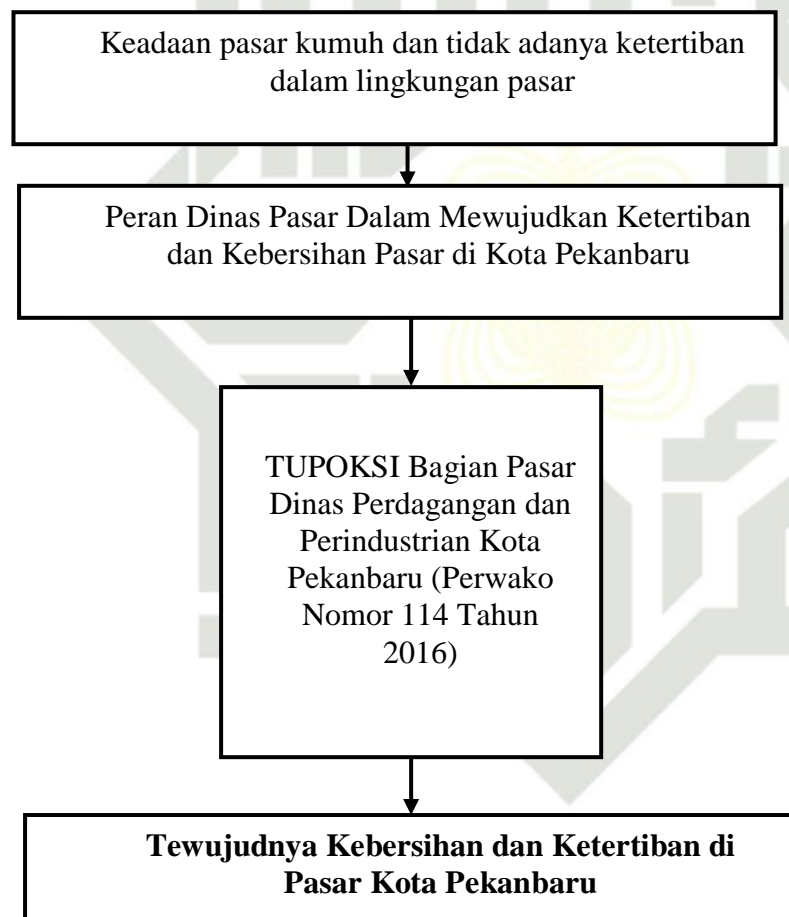
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12. Kerangka Pemikiran

Menurut Singarimbun (2006:46) Konsep Operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Konsep operasional pada penelitian ini adalah:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Data, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Selain di beberapa lembaga/Dinas tersebut, penelitian ini juga akan diadakan di 2 Tempat yaitu di pasar Cik Puan yang berada di Jl. Tuanku Tambusai dan juga Agus Salim yang berada di Jl. Soedirman. Pemilihan kedua tempat ini dikarenakan pada saat Pasar berlangsung menyebabkan Kemacetan, Kotor, dan juga Suasana yang kurang tertib. Penelitian ini dilakukan pada Januari 2019 sampai dengan April 2019.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Koentjaraningrat dalam (Zulganef, 2013:159) data merupakan sebagai catatan-catatan fakta fakta yang didapatkan dari hasil wawancara pengamatan, catatan mengenai perhitungan-perhitungan jumlah dan frekuensi kegiatan-kegiatan social, catatan mengenai pengukuran-pengukuran bidang, volume dan intensitas benda dan aktivitas kebudayaan, catatan-catatan kutipan dari bahan dokumen, dan surat kabar.

Data Primer

Sumber data primer (Sugiyono. 2009:156) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini didapat dari *Key Informan*, maupun Informasi dari Objek penelitian yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder

Sumber data sekunder (sugiyono: 2009:156) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Untuk penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah arsip dan dokumen tentang Pasar di Kota Pekanbaru, Kebersihan dan Ketertiban Pasar, dan Juga Arsip tentang Kondisi Kota Pekanbaru baik berupa jumlah penduduk, Kondisi Geografis, dan lain sebagainya yang berhubungan dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Kualitatif yaitu merujuk pada “cara-cara” mempelajari aspek kualitatif dari kehidupan sosial yang mencakup beragam dimensi sosial dari tindakan “Action” dan keadaan, hingga proses dan peristiwa, sebagaimana dimengerti berdasarkan konstruksi dan makna yang diorganisasikan oleh dan melalui praktik-praktik sosial. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono: 2014). Metode penelitian Kualitatif dipilih dengan alasan untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi social yang terkait dengan “Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada bidang pasar (studi tentang kebersihan dan

Ketertiban di pasar kota Pekanbaru)”. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

Observasi

Menurut Hadi dalam (Sugiyono, 2009:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan untuk melihat langsung keseluruhan situasi yang ada di pasar baik mengenai kebersihan maupun ketertibannya.

2. Wawancara

Teknik ini mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen berupa beberapa pertanyaan ini sudah disusun sebelum wawancara dilakukan. Melalui teknik ini diharapkan dapat dikumpulkan data tentang, umur, tingkat pendidikan, dari mana asal barang dagangan, berapa jam bekerja, berapa pendapatan mereka, berapa tanggungannya, dan lainnya.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan informan penelitian atau narasumber. Ditegaskan Koentjaraningrat (1995:44), bahwa metode wawancara atau interview ini mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu dengan mencoba mendapatkan keterangan ataupun pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang itu. Cara ini dilakukan, untuk mengetahui secara langsung apa yang dimaksud oleh subjek ataupun objek dalam bentuk percakapan antara dua pihak secara komunikatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, keterangan diterima oleh peneliti dari informan kunci sebagai pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat secara intensif dalam kegiatan Pasar.

Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat atau dimana data untuk variabel di peroleh. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah secara instansi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Adapun subjek orang secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Uraian
1.	Kepala Bidang Pasar
2.	Kepala Seksi Bidang Kebersihan dan Ketertiban
3.	Petugas Kebersihan
4.	Petugas Ketertiban
5.	Pelaku Usaha Dagang
6.	Masyarakat/pengunjung

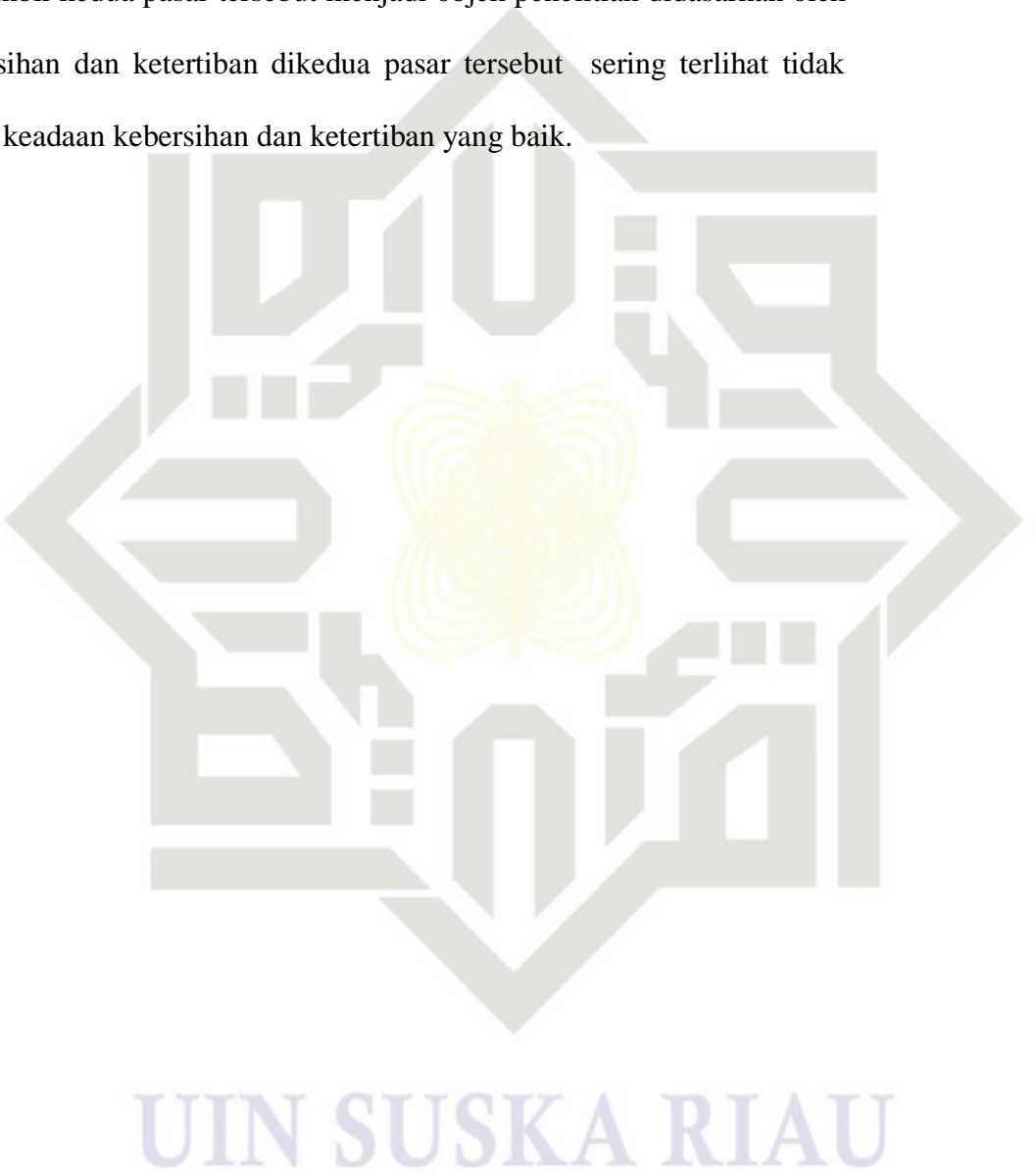
Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan ditarik kesimpulan. Adapaun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kebersihan dan ketertiban pasar. Adapun pasar-pasar yang menjadi objek penelitian ini adalah pasar tradisional Cik Puan dan Pasar tradisional Agus Salim. Penulis mengambil kedua pasar tersebut menjadi objek penelitian didasarkan oleh keadaan kebersihan dan ketertiban dikedua pasar tersebut sering terlihat tidak mencerminkan keadaan kebersihan dan ketertiban yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKAS PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuk Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Berikut dijelaskan luas wilayah perkecamatan di Kota Pekanbaru:

Tabel 4.1
Luas Kecamatan Kota Pekanbaru

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase Luas
Tampan	59,81	9,46
Payung Sekaki	43,24	6,84
Bukit Raya	22,05	3,49
Marpoyan Damai	29,74	4,70
Tenayan Raya	171,27	27,09
Lima Puluh	4,04	0,64
Sail	3,26	0,52
Pekanbaru Kota	2,26	0,36
Sukajadi	3,76	0,59
Senapelan	6,65	1,05
Rumbai	128,85	20,38
Rumbai Pesisir	157,33	24,88
Pekanbaru	632,26	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015.

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pekanbaru mempunyai luas wilayah 632,26 km². kecamatan Rumbai Pesisir menjadi kecamatan terluas dengan luas wilayah 157,33 km², dengan presentase luas 24,88%, dan kecamatan terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayahnya hanya mencapai 2,26 km² dengan presentase luas 0,36%.

Sedangkan Kota Pekanbaru berbatasan dengan-daerah Kabupaten/Kota:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada saat ini berjumlah 1.001.864 jiwa, dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin Perempuan 491.952 jiwa dan yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 486.017 jiwa. Kecamatan Tampan memiliki jumlah penduduk terbanyak dari kecamatan lainnya di kota Pekanbaru jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Tampan berjumlah 194.331 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2014). Lebih jelasnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru 2014.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru 2014. (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
Tampan	100.656	93.675	194.331
Payung Sekaki	51.993	47.177	99.170
Bukit Raya	54.628	51.533	106.161
Marpoyan Damai	72.864	68.705	141.569
Penayan Raya	74.067	68.452	142.519
Lima Puluh	21.819	22.163	43.982
Sail	11.464	11.492	22.956
Pekanbaru Kota	13.953	13.106	27.059
Sukajadi	24.347	24.989	38.183
Senapelan	18.819	19.364	39.733
Rumbai	3.722	36.011	73.231
Rumbai Pesisir	37.685	35.285	72.970
Jumlah	486.017	491.952	1.001.864

(Badan Pusat Statistik Pekanbaru, 2015)

Masyarakat kota Pekanbaru mayoritas menganut agama Islam dengan persentase 84,8%, namun terdapat juga agama-agama lain seperti, Khatolik 25%, Protestan 9,6%, Budha 3,46%, Hindu, Khonghucu dan lainnya 0.89% (sensus, 2010). Sedangkan Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari beberapa bidang, yaitu Pertanian, Industri, Kontruksi, Perdagangan, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan, Jasa, dan lainnya. Masyarakat di kabupaten ini memiliki mata pencaharian utama yaitu pada bidang Pertanian sebanyak 4,70%. Mata pencaharian masyarakat di bidang pertanian ini terdiri dari Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan. Bidang Industri sebanyak 6,56%. Bidang perdagangan sebanyak 40,25 %, transportasi dan komunikasi sebanyak 5,48%, keuangan 5,97%, jasa sebanyak 26,02%, dan bidang lainnya sebanyak 1,40% (BPS Kabupaten Pekanbaru, 2011).

4.3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

4.3.1. Sejarah Terbentuknya

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain :

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1996 : Bergabunglah Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru.

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan **Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001** Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.

Lalu pada Tahun 2008 berdasarkan **Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.

Tahun 2008 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya berdasarkan **Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru** dan **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**.

Tahun 2017 : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

a. Visi:

Terwujudnya Pusat Perdagangan Dan Jasa Yang Didukung Oleh Industri Yang Mapan, Guna Menunjang ekonomi Kerakyatan

b. Misi:

1. Menciptakan Industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata;
2. Menumbuh kembangkan industry dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan mutu produk industry yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab;
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industry dan perdagangan;
5. Menyediakan informasi industry dan perdagangan yang akurat;
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar / jasa serta perlindungan konsumen.

4.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dinas perdagangan dan perindustrian;
4. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
5. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perdagangan dan bidang perindustrian;
6. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
7. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
9. Pembinaan pegawai di lingkungan dinas perdagangan dan perindustrian;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
2. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
5. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
6. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program;

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

C. Bidang Tertib Perdagangan Dan Perindustrian

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolagian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri;
2. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil;
3. Melakukan penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan;
4. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Metrologi;
2. Seksi Pengawasan Perdagangan;
3. Seksi Pengawasan Perindustrian.

Setiap Seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian.

D. Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar. Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
2. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar;
3. Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
5. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar;
6. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar;
7. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja;
8. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan;
9. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
10. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait;
11. Pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar;
12. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
13. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan kepala bagian tata usaha;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pasar yang ada di dalam lingkungan pasar;
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pasar terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan;
2. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL;
3. Seksi Retribusi.

Setiap Seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Kebersihan Pasar Di Kota Pekanbaru, perannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam hal ini bidang pasar, tertuang dalam (Tugas Pokok dan Fungsinya yang tertuang dalam PERWAKO No 114 Tahun 2016). Dalam tugas pokok dan fungsi bidang pasar sudah melakukan peranannya, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Hal tersebut didasarkan oleh masih belum terwujudnya keadaan pasar yang bersih, karena masih banyak ditemukan tumpukan-tumpukan sampah tidak pada tempatnya. Kemudian masih belum tersedianya lokasi khusus parkir kendaraan pengunjung. Pada saat ini parkir yang tersedia bagi pengunjung masih menggunakan bahu jalan yang dapat mengganggu ketertiban lalu linat sekitar pasar.

Adapun faktor penyebab belum terwujudnya ketertiban dan kebersihan pasar adalah, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi Program kerja yang tidak terstruktur, pelaksanaan yang belum maksimal dan konsisten dan juga keterbatasan anggaran sehingga penyediaan sarana ketertiban dan kebersihan yang belum terpenuhi, pengawasan yang masih belum maksimal, dan juga belum adanya tindakan yang tegas kepada yang melanggar aturan dan kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan kebersihan dan ketertiban pasar yaitu kesadaran masyarakat baik itu pedagang dan pengunjung yang kurang tentang nilai ketertiban dan kebersihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Dari berbagai permasalahan yang ditemukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 6.2.1. Bidang pasar selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ketertiban dan kebersihan pasar pemerintah kota pekanbaru harus membuat program kerja yang terstruktur jelas dengan target jangka pendek, menengah dan panjangnya, kemudian melaksanakan tugas dengan maksimal dan optimal, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan ketertiban dan kebersihan yang baik.
- 6.2.2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu pedagang maupun pengunjung pasar akan pentingnya menciptakan ketertiban dan kebersihan pasar. Jika banyak masyarakat masih banyak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan maka ada baiknya memberikan peringatan ataupun sanksi kepada yang melanggar aturan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Andi Gajong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dahl. Robert A. 1994. *Analisa Politik Modern*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Gadjong, Agus Salim Andi, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Hoessein, Benyamin, dkk. 2005. *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Depok: PKPA-DK.
- Nasution, Arif. 2000. *Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Nurcholis Hanif, 2005. *Teori dan praktik dan otonomi daerah*, Jakarta: Grasindo
- Pamudji, S. 1985, *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto. Soerjono. 2009. *Suatu Pengantar Peranan Sosiologi*. Jakart: Rjawali Pers
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surianingrat, Bayu. 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Troha, Miftah. 2000. *Peran Ilmu Admionistrasi Publik dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik*, yogyakarta: UGM
- Wahab, solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Publik dari formulasi ke implementasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Zalganef. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen Lain

Akbar, An

Adi Mandala Louhenapessy, Chairul Amri, Ginung Pratidina. *Implementasi Kebijakan Kepala Pasar Dalam Program K3 (Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban) Di Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor*, Jurnal Governansi, 1(2): 14-24.

Aperta, Rizky. 2016. *Partisipasi Pedagang Dalam Pelaksanaan Kebersihan, Ketertiban Dan Keindahan Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2015

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Bidang Pasar. 2018

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Walikota No. 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



DOKUMENTASI





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

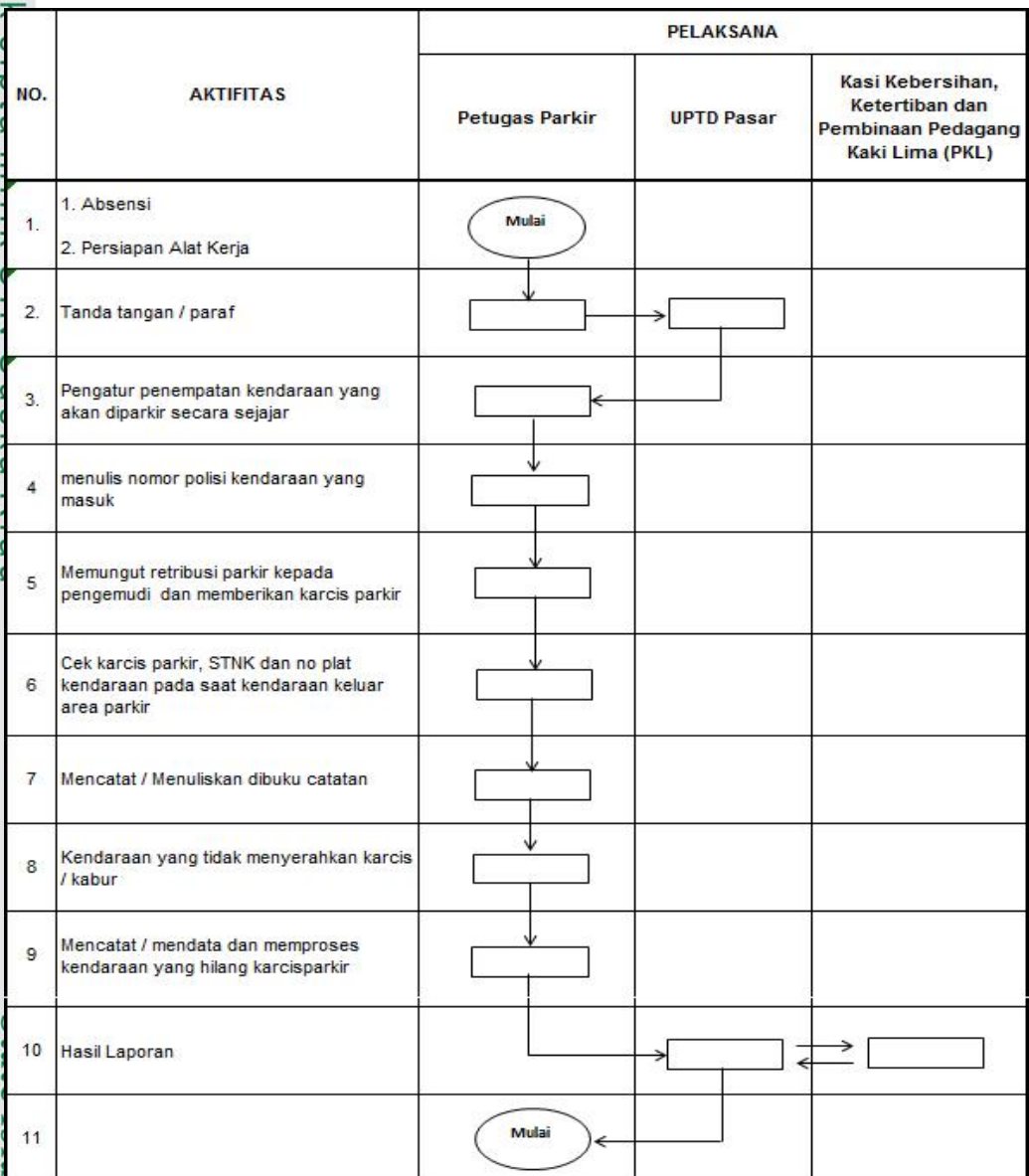
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU BIDANG PASAR SEKSI KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN PEMBINAAN PKL	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	23 Januari 2017
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	23 Januari 2017
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas
			Drs. INGOT AHMAD HUTASUHUT NIP. 197109261991011001
	Nama SOP	:	PENYUSUNAN SOP PETUGAS PARKIR
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana	
1. Perjanjian Kerja 2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : Tentang Pengelolaan Parkir 3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,		1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya. 2. Menguasai Lapangan	
Keterkaitan :		Peralatan/Kelengkapan :	
1. Ketertiban Pengguna Lahan Parkir		1. Surat Perintah Tugas 2. Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal 3. Peluit 4. Karcis Parkir 5. Jas Hujan, Payung 6. Rambu-rambu lali	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :	

SOP Ketertiban


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <p>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU BIDANG PASAR SEKSI KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN PEMBINAAN PKL</p>		Nomor SOP	:	
		Tanggal Pembuatan	:	23 Januari 2017
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Efektif	:	23 Januari 2017
		Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas
				Drs. INGOT AHMAD HUTASUHUT NIP. 197103261991011001
		Nama SOP	:	PENYUSUNAN SOP PENYAPUAN PASAR
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar 2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya. 2. Menguasai Lapangan 		
Keterkaitan :		Peralatan/Kelengkapan :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang Kaki Lima 2. Pedagang Lingkungan Pasar 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sapu Lidi dan Sapu Ijuk 2. Sekop Sampah (dari bahan plastik) 3. 2 (dua) jenis tong sampah (untuk sampah organik an non organik) 4. Gerobak Sampah (memakai roda karet) 5. Tempat Penampungan Sementara (TPS) 6. Alat Pengepel, Cairan Pel dan Pel Lantai 7. Galah Bambu / Kayu 8. Pakaian Seragam Kebersihan, Sepatu Karet dan kaos Tangan 9. Alat Potong Rumput 10. Ember, Lap 11. Tangga Aluminium 12. Alat Pembersih Bertekanan Tinggi 		
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :		
1 Kebersihan Lingkungan Pasar				

SOP Kebersihan

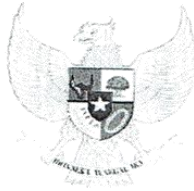
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	AKTIFITAS	PELAKSANA			
		Petugas THL Penyapuan Pasar	UPTD Pasar	Kasi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Kepala Bidang Pasar
1.	1. Absensi dan Apel Pagi 2. Persiapan Alat Kerja	Mulai			
2.	Mengambil alat-alat yang diperlukan di gudang penyimpanan alat-alat				
3.	Melaksanakan Penyapuan Lingkungan Pasar dan Sekitarnya				
4.	Sampah dikumpulkan dan diangkat menggunakan serok / gerobak;				
5.	Sampah sudah terkumpul dan diangkut oleh mobil sampah.				
6.	Petugas kebersihan mengisi daftar hadir pada kolom jam pulang				
7.	Laporan diserahkan ke Kasi				
8.	Laporan Diproses				
9.	Hasil Laporan				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 114 TAHUN 2016

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mengakibatkan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
7. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
16. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Metrologi.
 2. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 3. Seksi Pengawasan Perindustrian.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan;
 2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
 - e. Bidang Pasar, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan PasardanPengawasan.
 2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.
 3. Seksi Retribusi.
 - f. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 2. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - b. perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - c. pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - d. perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - e. penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - f. penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
 - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
 - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
 - i. pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - e. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
 - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. perumusan dan pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja ASN di lingkungan dinas.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - c. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - d. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
 - e. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - f. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
 - g. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. penyimpanan dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Program

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Fisik Program Pembangunan, Laporan Tahunan dan Laporan Evaluasi Kinerja.
 - b. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi barang dan jasa.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 10

- (1) Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian.
- (2) Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolagian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri.
 - b. penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil.
 - c. penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan.
 - d. penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 11

- (1) Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Metrologi.
 - b. Seksi Pengawasan Perdagangan.
 - c. Seksi Pengawasan Perindustrian.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Metrologi

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan metrologi.
- (2) Seksi Pengawasan Metrologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional bidang kemetrologian.
 - b. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang metrologi.
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan UPT Metrologi dalam hal pengawasan, penyaluran dan evaluasi terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Perdagangan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.
- (2) Seksi Pengawasan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
- c. pengoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan.
- d. pengoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan Laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
- e. pengoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Perindustrian

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perindustrian.
- (2) Seksi Pengawasan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. pembinaan kelancaran arus barang, perdagangan antar wilayah, monitoring harga, penggandaan dan pemyaluran serta stock bahan pokok kebutuhan masyarakat.
 - c. pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
 - d. pengordinsian dengan unit kerja lainnya.
 - e. penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
 - f. pelaksanaan pengawasan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.
 - g. pelaksanaan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan
Pasal 15

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
 - b. perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha export import dan teknis pembinaan sarana persana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), serta pengembangan manajemen promosi dagang di dalam dan di luar negeri.
 - c. perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu.
 - e. pengoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha.
 - f. pengoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan.
 - b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.
 - c. Seksi Sarana Distribusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Paragraf 1

Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan

Pasal 17

- (1) Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan informasi dan hukum perdagangan.
- (2) Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja.
 - b. pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. penyediaan data tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - d. penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
 - e. pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama.
 - f. pengolahan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan.
 - g. pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri.
 - h. pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
 - i. penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan mempunyai rincian tugas membantu Kepada Bidang Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan usaha dan jasa perdagangan.
- (2) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja.
 - b. pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. penyediaan data tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- d. penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- e. pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama.
- f. pengolahan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib Daftar Perusahaan.
- g. pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam dan luar negeri.
- h. pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
- i. penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 19

- 1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perdagangan dalam melaksanakan sub urusan sarana distribusi perdagangan.
- 2) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kota.
 - b. pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota.
 - c. peningkatan barang-barang ekspor, pengawasan terhadap mutu barang-barang impor dan yang akan diekspor.
 - d. persiapan, meneliti dan memproses terhadap permohonan pemberian Angka Pengenal Impor (API) Umum.
 - e. pemrosesan permohonan, pemberian, pencabutan Angka Pengenal Impor (API) Umum.
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor.
 - g. penyusunan program kerja.
 - h. pelaksanaan pelayanan umum.
 - i. pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- k. penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- l. pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pasar
Pasal 20

(1) Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar.

(2) Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.
- c. pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.
- d. pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.
- e. pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.
- f. pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
- g. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja.
- h. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
- i. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.

- j. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait.
- k. pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar.
- l. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- m. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha.
- n. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- 1) Bidang Pasar terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.
 - b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL.
 - c. Seksi Retribusi.
- 2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan

Pasal 22

- 1) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan pengembangan pasar dan pengawasan.
- 2) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. penelitian retribusi pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar.
- d. penyusunan program kerja.
- e. pelaksanaan pelayanan umum.
- f. pengoordinasian dengan unit kerja lainnya.
- g. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- h. penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- i. pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- j. pelaksanaan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar.
- k. pelaksanaan pengumpulan data di bidang retribusi pengelolaan pasar.
- l. pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar.
- m. pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL

Pasal 23

- a) Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL.
- b) Seksi Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.
 - c. perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketertarikan dan ketertiban pasar.
 - d. perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan pasar.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar.
- f. penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- g. pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar.
- h. pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan di dalam lingkungan pasar.
- i. penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- j. penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- k. pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- l. penyediaan tempat usaha pedagang kaki lima.
- m. pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang.
- n. penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi.
- o. perumusan dan pelaksanaan serta peningkatan pedagang kaki lima ke arah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan.
- p. pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima.
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Retribusi

Pasal 24

- 1) Seksi Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan retribusi.
- 2) Seksi Retribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan peralatan kerja.
 - b. pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar.
 - c. pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi metrologi.
 - d. pemeliharaan dokumentasi penagihan secara teratur kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. penyelesaian tunggakan-tunggakan dari Wajib Retribusi berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait;
- f. penginventarisasian permasalahan dari penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- g. penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan.
- h. pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- i. pengolahan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan sub bagian lain yang terkait.
- j. penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- k. penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- l. penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar.
- m. perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Buku Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pengelolaan Pasar yang ada di lingkungan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait.
- n. pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perindustrian
Pasal 25

- 1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perindustrian.
- 2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri.
 - b. penetapan bidang industri prioritas dan unggulan.
 - c. pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong.
 - d. promosi produk industri.
 - e. penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri.

- f. pemberian fasilitasi dan pengawasan standarisasi.
- g. penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan pembina industri.
- h. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan.
- i. pemberian fasilitasi kemitraan dan kerjasama.
- j. pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta industri kreatif.
- k. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri.
- l. penyusunan tata ruang industri.
- m. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.
- n. pendataan, analisis dan desiminasi data industri.
- o. pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri.
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- 1) Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.
 - b. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
 - c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.
- 2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri

Pasal 27

- 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan pengembangan industri.
- 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan.
 - b. penyediaan bahan-bahan dan peralatan kerja.
 - c. perumusan dan pelaksanaan fasilitasi usaha dalam rangka

UIN SUSKA RIAU

- d. penyiapan bahan bimbingan penggunaan bahan-bahan baku dan bahan penolong.
- e. penyusunan bimbingan teknis, terhadap mutu hasil produksi, penerapan standarisasi dan membantu kelancaran pengadaan peralatan bahan baku, bahan pembantu, barang modal serta pengembangan diversifikasi produk.
- f. penyediaan fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- g. pembinaan terhadap asosiasi industri/dewan industri daerah.
- h. perumusan dan penetapan standar kompetensi SDM industri dan membentuk aparatur pembina industri daerah.
- i. penyiapan dan pengusulan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.
- j. penyusunan bahan bimbingan pembinaan dalam pemilihan dan penggunaan bahan baku/bahan pembantu.
- k. perumusan dan pelaksanaan penelitian pengembangan dan pemanfaatan teknologi bidang industri.
- l. perumusan dan pelaksanaan sosialisasi teknologi bidang industri.
- m. pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Usaha Industri

Pasal 28

- 1) Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan sarana dan usaha industri.
- 2) Seksi Sarana dan Usaha Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan.
 - b. penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja.
 - c. perumusan dan penciptaan industri yang layak dan terhindar dari produksi limbah berbahaya.
 - d. pemberian rekomendasi usaha industri/pindah usaha industri/perusahaan usaha industri dan kawasan industri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. pemberian perlindungan kepastian berusaha.
- f. penetapan bidang usaha industri unggulan dan prioritas daerah.
- g. pelaksanaan promosi produk industri daerah.
- h. perumusan pembinaan dan pengembangan sarana dan kemampuan industri.
- i. pengajuan pembentukan UPT/Unit Usaha industri.
- j. penyusunan rencana kerja industri meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan rencana jangka panjang bidang industri.
- k. perumusan dan penyusunan tata ruang industri.
- l. pelaksanaan pendataan, analisis dan desiminasi data serta pelaporan ke pemerintah provinsi.
- m. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencemaran lingkungan.
- n. pelaksanaan pembinaan HKI dan desain produk industri.
- o. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi standarisasi bidang industri.
- p. penyusunan petunjuk teknis pendataan dan pemutahiran data industri kecil menengah dan besar, serta bimbingan terhadap kelompok usaha bersama (KUB), GKM dan SNI/ISO-9000.
- q. pelaksanaan pendataan laporan produksi usaha industri.
- r. pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

Pasal 29

- 1) Seksi Kerjasama dan Informasi Industri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan kerjasama dan informasi industri.
- 2) Seksi Kerjasama dan Informasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja.
 - b. penyiapan bahan-bahan dan peralatan kerja.
 - c. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama antar usaha industri.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. perumusan kegiatan dan pelaksanaan promosi produk industri.
- e. perumusan peningkatan dan pengembangan sistem informasi industri bagi kalangan internal dan eksternal.
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan, kerjasama dalam pengembangan industri antara industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
- g. perencanaan pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.
- h. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan peluang investasi sektor industri.
- i. pengoordinasian pembinaan agro industri serta industri hasil hutan.
- j. pengoordinasian pembinaan industri logam, mesin, elektronika dan aneka.
- k. pelaksanaan pelayanan umum.
- l. pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
- m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengembangan peluang investasi sektor industri, agro industri, industri hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika dan aneka.
- n. pelaksanaan koordinasi perumusan pembinaan industri kecil.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sagar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2016

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 114.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

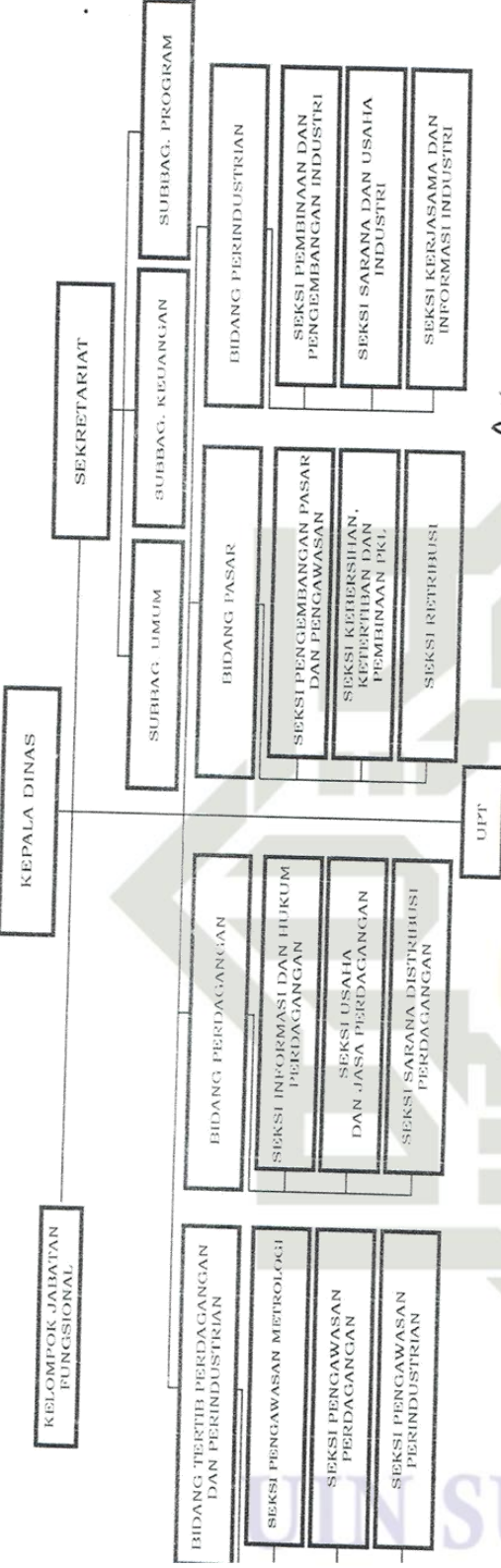
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 111 TAHUN 2016
 LAMPIRAN :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU
 BAGIAN PENGADWANGAN DAN PENGAWASAN



WALIKOTA PEKANBARU
 6/9/2016
 FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERTTA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 114



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/21111
T E N T A N G



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2209/2019 Tanggal 18 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DEFRI HANDRIAN |
| 2. NIM / KTP | : 11375100606 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN PASAR DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 April 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru



Hak Cipta Diinungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



232018

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/1338

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/21111 tanggal 2 April 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **DEFRI HANDRIAN**
2. NIM : 11375100606
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. CIPTA SARI UJUNG KEL. TANGKERANG SELATAN KEC. BUKIT RAYA PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN PASAR DI KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan Photo Copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 April 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS

H.MAISISCO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Teratai No. 83 Telp. (0761) 21669, 25174 Fax. (0761) 25174
PEKANBARU - 28127

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 071/OPP-9.2/733

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A	: DEFRI HANDRIAN
N I M	: 11375100606
F A K U L T A S	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
J U R U S A N	: ADMINISTRASI NEGARA
J E N J A N G	: S.I
A L A M A T	: JL. CIPTA SARI UJUNG KEL. TANGKERANG SELATAN KEC. BUKIT RAYA

Benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan melakukan wawancara langsung kepada Kasi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru guna menyelesaikan tugas akhir / skripsi dengan judul :


“PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN PASAR DI KOTA PEKANBARU”.

Penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru nomor : 071 / BKBP-REKOM/2019/1338 tanggal 2 April 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Juli 2019

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PEKANBARU**


DR. NGOT ARNIDAD HUTASUHUT
Pekanbaru Tk. I (IV/b)
NIP. 119710926 199101 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis yaitu Defri Handrian lahir di Pekanbaru, 7 Juni 1995. Merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Dasrizal dan Ibu Indrawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 003 Pekanbaru pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 22 Pekanbaru dan selesai pada Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 11 Pekanbaru selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 melalui jalur SNMPTN, penulis diterima di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada bulan Januari tahun 2016 penulis melaksanakan Prakte Kerja Lapangan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Pada bulan juli 2016 penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Rambah Samo, Rokan Hulu Riau. Pada tanggal 27 September 2019 penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan Judul Skripsi “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Mewujudkan Kebersihan dan Ketertiban Pasar di Kota Pekanbaru” Yang dibimbing oleh Bapak Muammar Alkadafi S.Sos, M.Si